

TERKAIT KORUPSI RUMAH JABATAN

KPK Periksa Sekjen DPR

JAKARTA (KR) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI pada tahun anggaran 2020. Penyidik KPK juga turut memeriksa Hippi Hidupati selaku PNS Setjen DPR RI dan Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI sebagai saksi dalam perkara yang sama.

"Untuk dua saksi dimaksud, hadir dan saat ini telah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (14/3).

KPK juga turut memanggil sejumlah saksi lain dalam perkara yang sama yakni Staf Setkom VI Setjen DPR Erni Lupi

Ratih Puspasari dan PNS Setjen DPR RI selaku Pemelihara Sarana dan Prasarana/Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Sarana Kelengkapan Rumah Jabatan Anggota Kalibata DPR RI Tahun anggaran 2020 Firman Adiputra. Kemudian PNS Setjen DPR RI/Analisis Tata Usaha Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Moh Indra Bayu, PNS Setjen DPR RI/Pengadministrasi Umum/Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Sarana Kelengkapan RJA Kalibata DPR RI TA 2020 Masdar, PNS Setjen DPR RI/Pemelihara Sarana dan Prasarana/Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Sarana Kelengkapan RJA Ulujami DPR RI TA 2020 Mohamad Iqbal.

Selanjutnya Kabag Risalah Persidangan I DPR RI, tanggal 1 Juli 2019-sekarang

Muhammad Yus Iqbal, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan DPR RI 2019-2021 Rudi Rochmansyah dan PNS Setjen DPR RI/Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma DPR RI Satrio Priambodo.

Sebelumnya, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. Menurut Ali Fikri, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati pimpinan KPK, pejabat struktural Keudeputian Penindakan KPK, serta penyidik dan penuntut KPK. "Melalui sebuah gelar perkara, disepakati naik pada proses penyidikan terkait dengan dugaan korupsi untuk pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI," katanya. **(Ant/Has)-f**

PSU Kuala Lumpur Segera Direkap

JAKARTA (KR) - Anggota KPU RI August Mellaz mengungkapkan, hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur Malaysia, akan segera dijadwalkan mengikuti rekapitulasi nasional di Kantor KPU RI.

"Satu dua hari ini akan dijadwalkan untuk ke Jakarta," kata Mellaz di Kantor KPU RI Jakarta, Kamis (14/3).

la menyatakan, rekapitulasi untuk metode kotak suara keliling (KSK) dan tempat pemungutan suara (TPS) telah selesai. "Informasi terakhir, sejak semalam (kemarin) saya dapatkan, itu semua proses selesai di Kuala Lumpur," ujarnya.

Berdasarkan Peraturan KPU No 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024. KPU sudah menetapkan daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) untuk PSU di Kuala Lumpur mencapai 62.217 orang yang terdiri 42.372 orang pemilih di 22

TPSLN dan 19.845 orang pemilih di 120 KSK.

Angka itu diperoleh dari total pemilih yang hadir di Kuala Lumpur lewat tiga metode pemungutan suara sebelumnya, baik yang tercatat pada daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK).

Total pemilih untuk tiga metode yang tercatat dalam DPT, DPTb dan DPK mencapai 78 ribu. Angka 78 ribu itu menjadi basis data untuk pemutakhiran dengan tiga kategori, yakni validitas alamat, analisis kegandaan, dan validitas nomor induk kependudukan (NIK) maupun nomor paspor.

KPU melaksanakan PSU Kuala Lumpur pada Minggu (10/3). Pelaksanaan metode TPSLN dilakukan di WTC Kuala Lumpur sedangkan KSK disebar di 120 lokasi di Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur maupun Putrajaya. **(Ant)-f**

Banjir

disertai angin kencang.

Arus lalu lintas di Jalur Pantura Jateng, yaitu di Jalan Kaligawe, Semarang, dialihkan menyusul genangan banjir cukup tinggi. Yunalid mengatakan, arus kendaraan dari Semarang ke Demak dan sebaliknya pada hari kedua bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini untuk sementara dialihkan.

Menurutnya, ketinggian air mulai dari Terowongan Tol Muktoharjo hingga depan RS Islam Sultan Agung di Semarang mencapai 70 cm. Kendaraan dari arah Demak diarahkan melalui Jalan Wolter Monginsidi kemudian masuk kembali ke jalan tol melalui Pintu Tol Gayamsari. "Demikian juga arus kendaraan sebaliknya dari Semarang yang akan menuju Demak," katanya.

Adapun kendaraan dari arah Barat yang akan menuju Demak melalui jalur arteri Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang juga dialihkan melalui Jalan Tol Kramping. Selain Jalan Kaligawe, akses menuju Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang di wilayah Puri Anjasmoro Semarang juga tergenang.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat ketinggian banjir yang merendam rel di jalur antara Stasiun Semarang Tawang hingga Stasiun Alas Tuwa mencapai 40 cm dari kepala rel. "Jalur masih tergenang di beberapa titik antara Km 2 hingga Km 5," kata Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo.

kan akibat banjir di Semarang. Sejumlah titik yang terendam banjir antara lain jalur antara Stasiun Semarang Tawang hingga Stasiun Alas Tuwa, petak antara Stasiun Tawang hingga Stasiun Semarang Poncol, serta petak antara Stasiun Mangkang hingga Stasiun Kaliwungu.

Seorang kakek renta dan ibu yang baru saja melahirkan bayi dievakuasi petugas Polres Kudus bersama Tim Relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus setelah sebagian wilayah Kabupaten Kudus dilanda banjir, Kamis. Evakuasi warga lanjut usia (lansia) dan ibu melahirkan mendapatkan prioritas utama, menyusul kemudian penduduk lain terdampak banjir diungsikan ke tempat lebih aman.

Banjir di Kudus sedikitnya merendam 17 desa di enam kecamatan akibat melimpasnya sejumlah sungai setelah wilayah 'Kota Kretek' itu diguyur hujan selama satu pekan nyaris tanpa henti. Wilayah terdampak yaitu desa-desa di Kecamatan Mejobo, Jati, Bae, Jekulo, Kaliwungu dan Undaan dengan ketinggian air bervariasi 20-60 cm.

Ketinggian Genangan air dimungkinkan semakin tinggi karena belum ada tanda-tanda hujan mereda. Wilayah terdampak juga meluas jika hujan tak berhenti. Banjir tak hanya menggenangi pemukiman, tetapi juga merendam jalan dan area persawahan.

Kasi Kegawatdaruratan dan Logistik BPBD Kudus Achmad Munaji mengatakan, hujan terus-menerus sejak 8 Maret lalu telah menyebabkan sejumlah sungai limpas dan tumpah menggenangi jalan, pemukiman, sekolah dan fasilitas umum lain, serta area persawahan.

Tercatat sudah ada 17 desa di enam kecamatan yang terdampak, yaitu Desa Kesambi, Mejobo, Golantepus, Tenggeles, Kirig, Jojo dan Temulus Kecamatan Mejobo, Desa Jati Wetan, Jetis Kapuan, Tanjungkarang, Dukuh Goleng Pasuruhan Lor dan Dukuh Badongan Tumpangkrasak (Jati), Desa Ngembalrejo (Bae), Desa Pladen (Jekulo), Desa Prambatan Lor dan Desa Setrokalangan (Kaliwungu), serta Desa Karangrowo Kecamatan Undaan.

"Banjir wilayah Desa Kesambi dan Temulus Mejobo disebabkan meluapnya Sungai Dawe dan Sungai Piji, sedang di Desa Pladen, Jekulo akibat limpasan Sungai Jawik," ungkapnya.

Untuk wilayah Jati diakibatkan tingginya debit Sungai Wulan sehingga air yang berada di jalan dan kawasan pemukiman tidak bisa terbuang ke sungai. Sedangkan genangan di Dukuh Karangturi, Desa Setrokalangan, Kaliwungu akibat air tak mampu masuk ke Sungai Serang Welahan Drains (SWD) I.

Di Desa Setrokalangan, warga paling terdampak yaitu penduduk Dukuh Karangturi. Meski hanya sebagian rumah mereka yang tergenang, namun akses jalan ke Dukuh Karangturi sepanjang 1,2 km tak bisa dilewati karena tertutup genangan air 50 cm. Kemudian banjir di Dukuh Tanggulangin, Jati Wetan, Jati telah menggenangi akses jalan dan pemukiman setinggi 20-60 cm.

Belum ada laporan korban jiwa, meski di Desa Temulus, Mejobo dikabarkan ada seorang yang mengidap gangguan jiwa usia 35 tahun tenggelam dan belum ditemukan. "Jumlah seluruh warga terdampak banjir di Kudus 4.132 KK atau 13.102 jiwa, serta area persawahan yang terendam mencapai 1.500 hektare," ujar Munaji.

Pemkot Pekalongan masih terus mengevakuasi warga yang terdampak banjir ke beberapa lokasi pengungsian. Kepala BPBD Kota Pekalongan Apriyanto Dwi Purnomo mengatakan, curah hujan deras dengan intensitas tinggi sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan beberapa titik terendam banjir.

Menurutnya, data sementara jumlah pengungsi mencapai 572 orang, dan diperkirakan terus bertambah seiring kondisi curah hujan yang masih tinggi. Banjir mulai melanda Rabu (13/3), dan kondisi ketinggian air terus bertambah dengan curah hujan cukup ekstrem pada Kamis (14/3) ini.

"Beberapa titik banjir di Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Utara mencapai ketinggian bervariasi, rata-rata 50 cm," katanya. **(Trq/Ant/San)-f**

Sambungan hal 1

UJI

praktik korupsi kekuasaan secara terbuka.

Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali sadar dengan meiboikot partai politik yang menjelma menjadi penghambatan kekuasaan dan uang serta terang-terangan mengkhianati tugas utamanya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. "Selain itu juga meminta lembaga-lembaga negara sesuai tugasnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk mengusut semua kecurangan Pemilu. Termasuk yang dilakukan Presiden Jokowi, pada masa sebelum, ketika, dan sesudah pemungutan suara. Pemilu harus menjadi sarana menghasilkan pemerintahan yang absah (legitimate)," tandas Fathul.

UJI juga menuntut seluruh penyelenggara negara untuk menjunjung tinggi etika berbangsa dan bermegara, menghormati hak dan kebebasan warga negara, dan mengembalikan prinsip independensi peradilan. Kemudian, mengingatkan pejabat negara bahwa mereka memiliki tugas konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi terca-

painya masyarakat yang sejahtera, beradab, adil, dan makmur. Selain itu mendorong partai politik untuk menjaga independensinya. Sehingga berdaya dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mampu menjalankan perannya untuk membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bermegara.

Sebelum tabur bunga, beberapa elemen UJI melakukan orasi penanda matinya demokrasi. Ada elemen guru besar, program studi juga alumni. Dosen FTSP Dr Revianto Budi Santoso dalam ora singkatnya mengaku sangat ingin berziaah ke Makam Bung Hatta dan meminta maaf. "Karena sesudah kau wariskan negeri ini dan kemudian bangga menyebut Indonesia Emas, apa yang terjadi sekarang ini," tanyanya.

Demokrasi kata Revianto, telah dihabisi. Jika pun masih ada hanya sekadar sebagai zombie. Ironis, demokrasi dihabisi oligarki, birokrasi, dinasti yang diorkestrasi Jokowi. Kini kehidupan berjalan dilatarbelakangi transaksi, tanpa moral, etika dan logika.

"Demokrasi tidak mencerdaskan tidak ada guna. Karena hanya membabi buta," tandasnya. **(Fsy)-f**

Sambungan hal 1

Sultan

Mestinya diobati, jangan malah dipotong," ungkap Sultan.

Sementara soal kemungkinan penerapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk penya- kit antraks, menurut Sultan untuk situasi saat

ini belum perlu diterapkan. "Kalau soal itu, saya kira belum (penetapan status KLB), kecuali kalau memang ada dasar (antraks) berkembang. Kalau tidak dan bisa terlokalisasi kan lebih baik," ujar Sultan. **(Ria)-f**

Sambungan hal 1

Menakar

bertahap mengingatkan kita pada pelaksanaan Kurikulum 2006 dan K-13. Saat itu, banyak sekolah/madrasah melaksanakan dua kurikulum sekaligus. Akibatnya, guru dan siswa mengalami kebingungan dalam pembelajaran di kelas. Sebagai contoh, kini dalam satu sekolah guru Bahasa Indonesia mengajar siswanya dengan K-13 dan KM. Kondisi itu rumit lagi jika jumlah guru Bahasa Indonesia hanya dua orang.

Berikutnya, dalam pelaksanaan KM terdapat penggunaan PMM. Saat ini, banyak guru mengeluh soal beban sertifikat pelatihan, lokakarya, dan lainnya, untuk penilaian kinerja di PMM. Padahal, mereka harus berbagi waktu untuk mengajar, keluarga dan sebagainya. Menurut penulis, solusinya yaitu penilaian kinerja guru berbasis komunitas profesi guru (Musyawarah Guru Mata Pelajaran/MGMP dan sekolah/madrasah).

Lewat MGMP, para guru didorong proaktif dalam mengembangkan profesi.

Pengembangan profesi guru di MGMP seiring sejalan dengan peningkatan literasi, inovasi pembelajaran, dan penulisan karya ilmiah. Lewat sekolah/madrasah, para guru didorong proaktif pula dalam mengembangkan profesinya. Pengembangan profesi guru di sekolah/madrasah sesuai dengan etika profesi, kultur akademik, dan perhatian terhadap siswa/peserta didik.

Ketiga, kondisi mendatang. Kita berharap, pemerintahan mendatang (2024-2029) dapat melanjutkan KM sebagai kurikulum nasional. Tentu, kontinuitas KM sebagai Kur-Nas didukung evaluasi menyeluruh. Para guru, akademisi, praktisi, peneliti, pengurus organisasi profesi, legislator, aktivis LSM, hingga PB PGRI proaktif memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan KM. Evaluasi dari berbagai pihak itu penting, agar catatan-catatan minus dalam KM dapat diperbaiki.

Perbaikan atas pelaksanaan KM selaras dengan pengembangan ilmu penge-

tahuan, teknologi, dan seni (ipteks) saat ini. Salah satu ciri perkembangan ipteks ialah kemampuan 4C (*critical thinking, collaborative, communicative and creative*). Dalam KM, para siswa dididik untuk memberdayakan kemampuan 4C-nya lebih optimal. Apa pasal? Karena mereka kelak hidup dalam zaman yang menuntut diri berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkreasi.

Akhir kata, peluang KM menjadi Kur-Nas dipertimbangkan banyak aspek, salah satunya ialah tiga kondisi di atas. Yang terpenting, kata Anies Baswedan, kurikulum berubah tidak otomatis kualitas pendidikan meningkat. Namun, lanjutnya, jika kualitas guru meningkat, kualitas pendidikan pasti meningkat. Itu kunci. Kunci peluang KM menjadi Kur-Nas terletak pada kualitas guru. Sudahkah kita berfokus pada peningkatan kualitas guru saat ini? **(Penulis adalah Dosen FKIP UAD; Mahasiswa S-3 UNY)-f**

Sambungan hal 1

Kemenhub

go.id/. "Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan tiket mudik gratis," ujarnya.

Dengan total kuota sebanyak 9.800 penumpang dan 4.800 sepeda motor, program ini akan dilaksanakan sebanyak empat kali perjalanan. "Program ini akan dilaksanakan sebanyak empat kali perjalanan dengan rute dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan sebaliknya," ujar Capt Antoni.

Keberangkatan arus mudik dijadwalkan pada

tanggal 5 dan 7 April, sementara keberangkatan arus balik akan dilaksanakan pada tanggal 13 dan 15 April 2024. "Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berharap bahwa program Mudik Gratis Sepeda Motor Naik Kapal Laut ini dapat memberikan manfaat yang

besar bagi masyarakat yang merencanakan perjalanan mudik mereka. Dengan kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta kondisi perjalanan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat," pungkasnya. **(Ati)-d**

Sambungan hal 1



ASN Pria

Sambungan hal 1

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menambahkan, dengan pemberian hak cuti tersebut, diharapkan kualitas proses kelahiran anak bisa berjalan dengan baik. Mengingat itu merupakan fase penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terbaik penerus bangsa. **(Ati)-d**

Lokasi	Pagi	Siang	Cuaca Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

11/3 12/3 13/3 14/3

Sumber: Bank Indonesia
Sumber: Multi Authorized Money Changer, Telp. (0274) 547688
KR-JOSRSV

Muhammad Zuhdan, S.I.P.M.A
Kaprodil Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta

CUKUP membingungkan wacana berganti-gantinya ambang batas parlemen nasional yang digulirkan oleh partai-partai politik akhir-akhir ini. Ada partai yang setuju ambang batasnya 4 %, ada yang 7 % dan juga ada yang berkehendak 0 %. Atas dasar apa sesungguhnya partai-partai politik tersebut menentukan ambang batas parlemen nasional tersebut menjadi pertanyaan publik yang belum jelas alasannya.

Banyak jawabannya yang sangat normatif dari para politisi. Misalnya ada politisi yang menyatakan bahwa biar partai-partai kecil yang ikut serta pemilu berusaha lebih keras untuk mendapatkan suaranya agar lolos ambang batas parlemen nasional. Jawaban ini kontradiktif dengan syarat kelolosan partai yang terverifikasi KPU RI, yang tidak melihat besar tidaknya partai politik tetapi kelengkapan syarat administrasi sebuah parpol bisa ikut pemilu.

Kalau memang parpol kecil ataupun partai baru yang ikut pemilu tidak diperbolehkan masuk parlemen nasional karena tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 % ataupun 7 %, baiknya memang sejak awal verifikasi KPU RI parpol-parpol tersebut dikaji ulang syarat administrasinya ataupun kapasitas elektoralnya. Tetapi hal ini tentu saja akan melanggar prinsip demokrasi yang mengandaikan semua warga negara punya hak berorganisasi, menyatakan pendapat, dan berepreksi. Parpol menjadi salah satu kendaraan untuk menyuarakan hal tersebut.

Mengingat kembali dasar sistem kepartaian kita : Kritik Untuk Semua Parpol

Sistem kepartai kita lebih cenderung ke arah multipartai, dengan asumsi bahwa negara kita plural sehingga dengan adanya banyak partai bisa menjadi wadah bagi beragam perwakilan suara dari beragam kelompok masyarakat yang ada. Hal ini menjadi patokan awal untuk menyetujui bersama bahwa sistem kita sistem multipartai, terlepas dari gagasan transisi demokrasi pasca 1998 yang menghendaki adanya perubahan sistem partai yang jaman Orba yang diperbolehkan negara hanya tiga partai, yaitu PPP, Golkar, dan PDI.

Demokrasi pluralistiklah sebenarnya yang harus menjadi dasar pilihan sistem kepartaian kita, sehingga tidak ada istilah lagi ada partai besar atau partai kecil yang berlutut pada perolehan jumlah suara di pemilu. Partai besar tentu harus menyadari hal itu, apalagi partai kecil yang tidak hanya ber cita-cita pragmatis sepanjang hayat hanya mengejar suara untuk dikonversi

menjadi bantuan politik (banpol) dari negara. Tapi prinsip demokrasi pluralistik inilah yang harus menjadi dasar partai-partai kecil untuk tetap eksis sepanjang hayat bukan musiman saja.

Belajar dari Green Party di AS dan Jerman : Partai Kecil Dampak Besar

Di beberapa negara lain yang menganut sistem biparty ataupun multiparty, keberadaan partai-partai kecil cukup signifikan mewakili kepentingan suara kelompok politik tertentu yang berbeda ideologi dan platform politiknya dengan partai politik yang ada. Misalnya di Amerika Serikat atau Jerman. Ada namanya Green Party atau lebih familier dengan bahasa kita, yaitu Partai Hijau. Partai ini eksis dikedua negara tersebut mewakili suara kelompok-kelompok masyarakat yang konsen pada isu lingkungan. Mereka diakui negara walaupun kadang mereka ikut kontestasi pemilu kadang juga tidak, bahkan jumlah persentase politisi mereka yang masuk dalam struktur pemerintahan sangatlah kecil.

Sambungan hal 1

Polemik Persentase Ambang Batas Parlemen : Partai Besar vs Partai Kecil



Muhammad Zuhdan, S.I.P.M.A
Kaprodil Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta

CUKUP membingungkan wacana berganti-gantinya ambang batas parlemen nasional yang digulirkan oleh partai-partai politik akhir-akhir ini. Ada partai yang setuju ambang batasnya 4 %, ada yang 7 % dan juga ada yang berkehendak 0 %. Atas dasar apa sesungguhnya partai-partai politik tersebut menentukan ambang batas parlemen nasional tersebut menjadi pertanyaan publik yang belum jelas alasannya.

Banyak jawabannya yang sangat normatif dari para politisi. Misalnya ada politisi yang menyatakan bahwa biar partai-partai kecil yang ikut serta pemilu berusaha lebih keras untuk mendapatkan suaranya agar lolos ambang batas parlemen nasional. Jawaban ini kontradiktif dengan syarat kelolosan partai yang terverifikasi KPU RI, yang tidak melihat besar tidaknya partai politik tetapi kelengkapan syarat administrasi sebuah parpol bisa ikut pemilu.

Kalau memang parpol kecil ataupun partai baru yang ikut pemilu tidak diperbolehkan masuk parlemen nasional karena tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 % ataupun 7 %, baiknya memang sejak awal verifikasi KPU RI parpol-parpol tersebut dikaji ulang syarat administrasinya ataupun kapasitas elektoralnya. Tetapi hal ini tentu saja akan melanggar prinsip demokrasi yang mengandaikan semua warga negara punya hak berorganisasi, menyatakan pendapat, dan berepreksi. Parpol menjadi salah satu kendaraan untuk menyuarakan hal tersebut.

publik yang belum jelas alasannya.

Banyak jawabannya yang sangat normatif dari para politisi. Misalnya ada politisi yang menyatakan bahwa biar partai-partai kecil yang ikut serta pemilu berusaha lebih keras untuk mendapatkan suaranya agar lolos ambang batas parlemen nasional. Jawaban ini kontradiktif dengan syarat kelolosan partai yang terverifikasi KPU RI, yang tidak melihat besar tidaknya partai politik tetapi kelengkapan syarat administrasi sebuah parpol bisa ikut pemilu.

Kalau memang parpol kecil ataupun partai baru yang ikut pemilu tidak diperbolehkan masuk parlemen nasional karena tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 % ataupun 7 %, baiknya memang sejak awal verifikasi KPU RI parpol-parpol tersebut dikaji ulang syarat administrasinya ataupun kapasitas elektoralnya. Tetapi hal ini tentu saja akan melanggar prinsip demokrasi yang mengandaikan semua warga negara punya hak berorganisasi, menyatakan pendapat, dan berepreksi. Parpol menjadi salah satu kendaraan untuk menyuarakan hal tersebut.

Mengingat kembali dasar sistem kepartaian kita : Kritik Untuk Semua Parpol

Sistem kepartai kita lebih cenderung ke arah multipartai, dengan asumsi bahwa negara kita plural sehingga dengan adanya banyak partai bisa menjadi wadah bagi beragam perwakilan suara dari beragam kelompok masyarakat yang ada. Hal ini menjadi patokan awal untuk menyetujui bersama bahwa sistem kita sistem multipartai, terlepas dari gagasan transisi demokrasi pasca 1998 yang menghendaki adanya perubahan sistem partai yang jaman Orba yang diperbolehkan negara hanya tiga partai, yaitu PPP, Golkar, dan PDI.

Demokrasi pluralistiklah sebenarnya yang harus menjadi dasar pilihan sistem kepartaian kita, sehingga tidak ada istilah lagi ada partai besar atau partai kecil yang berlutut pada perolehan jumlah suara di pemilu. Partai besar tentu harus menyadari hal itu, apalagi partai kecil yang tidak hanya ber cita-cita pragmatis sepanjang hayat hanya mengejar suara untuk dikonversi

menjadi bantuan politik (banpol) dari negara. Tapi prinsip demokrasi pluralistik inilah yang harus menjadi dasar partai-partai kecil untuk tetap eksis sepanjang hayat bukan musiman saja.

Belajar dari Green Party di AS dan Jerman : Partai Kecil Dampak Besar

Di beberapa negara lain yang menganut sistem biparty ataupun multiparty, keberadaan partai-partai kecil cukup signifikan mewakili kepentingan suara kelompok politik tertentu yang berbeda ideologi dan platform politiknya dengan partai politik yang ada. Misalnya di Amerika Serikat atau Jerman. Ada namanya Green Party atau lebih familier dengan bahasa kita, yaitu Partai Hijau. Partai ini eksis dikedua negara tersebut mewakili suara kelompok-kelompok masyarakat yang konsen pada isu lingkungan. Mereka diakui negara walaupun kadang mereka ikut kontestasi pemilu kadang juga tidak, bahkan jumlah persentase politisi mereka yang masuk dalam struktur pemerintahan sangatlah kecil.

Partai hijau di kedua AS maupun Jerman lebih mirip dengan kelompok kepentingan cara kerja dan strategi politiknya. Mereka lebih banyak advokasi dan kampanye isu-isu lingkungan baik kala menjelang pemilu atau hari-hari biasa. Persentase perolehan suara mereka kecil saat pemilu dan sekiranya ada ambang batas parlemen nasional 4 % mereka tidak akan masuk, misalnya saja di Kongres ataupun Senat Amerika Serikat kursi mereka 0 %, tetapi partai ini tetap eksis sebagai representasi politik orang-orang yang konsen pada isu lingkungan yang tidak cocok dengan ideologi platform Partai Demokrat maupun Partai Republik.

Rakyat Tidak Peduli Parpol Besar Atau Kecil

Refleksi Bersama Masyarakat tentu saja lama-lama akan bertanya-tanya, apa bedanya antara partai besar dengan partai kecil, selain jumlah suara yang mereka peroleh saat pemilu. Kalaupun yang dipermasalahkan adalah perbedaan angka suara tersebut, tentu keberadaan partai kecil tidak penting keberadaannya. Tapi

keberadaan partai politik sejatinya tidak sebatas untuk kepentingan elektoral atau demokrasi prosedural saja, seiring dengan waktu dan pergantian situasi politik partai besar bisa menjadi partai kecil dan partai kecil bisa menjadi partai besar.

Partai yang tidak bisa menyesuaikan jaman akan dengan sendirinya ditinggalkan oleh pemilihnya sendiri, kalaupun ada pemilih ideologis yang tersisa mereka juga tidak akan bisa mewariskannya ke pemilih generasi barunya tanpa ada upaya keras pendidikan politik dari parpol tersebut.

Artinya besar kecil parpol tidak lagi dipedulikan sama rakyat, tetapi keberadaan dan fungsi parpol baik di pemerintahan, parlemen, ataupun masyarakat nyata dirasakan dampaknya bagi demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kesejahteraan rakyat. ***